



**RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tengah Tahun 2022 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BKD Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2022.

Semarang, Maret 2021

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah**



Drs. WISNU ZAROH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630526 199503 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah, terakhir diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan awal RENJA PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,

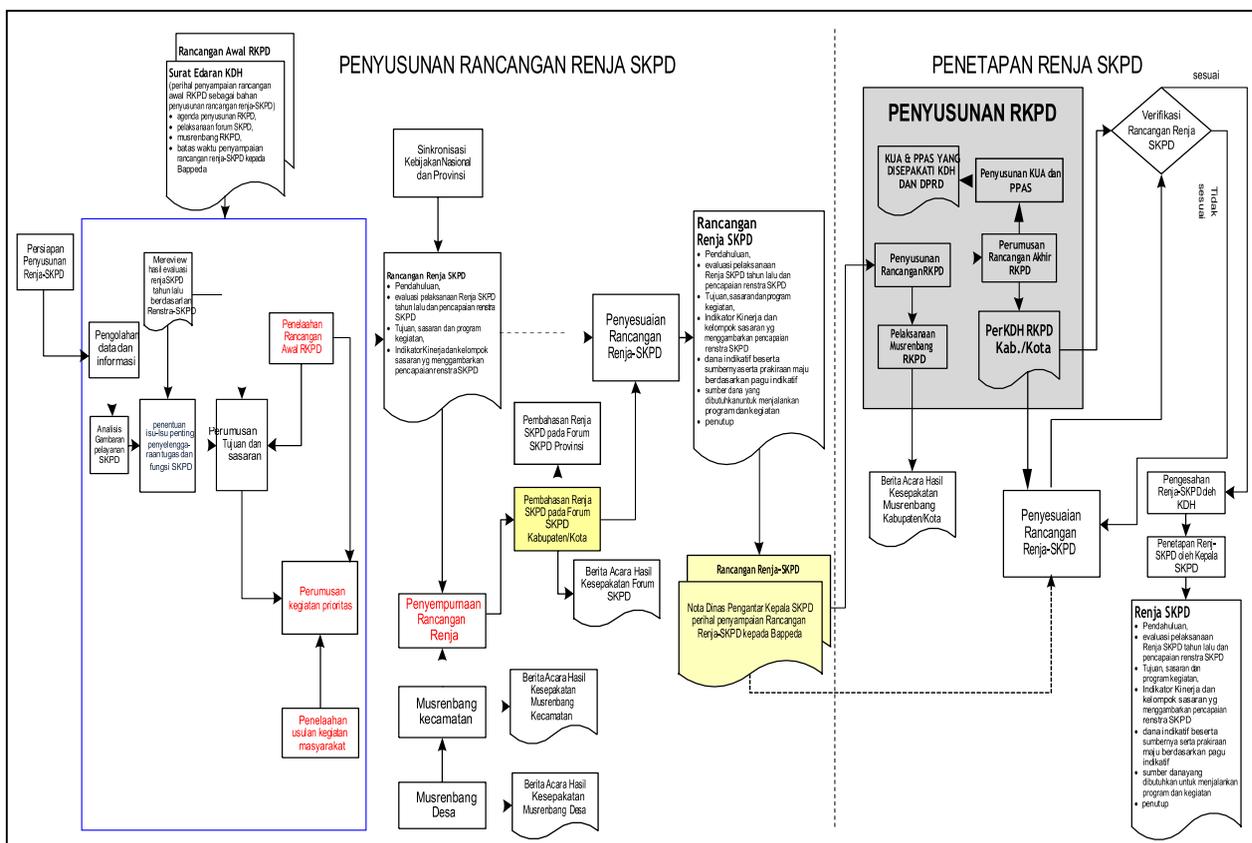
lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penetapan Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi disampaikan kepada kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja SKPD sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD
berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017



Renja SKPD/Renja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Renja PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKA- Perangkat Daerah. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA, sebagai penjabaran dari APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai wujud dari proses penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan target capaian kinerja yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaiannya Landasan Hukum.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun terkait dengan Renja Badan Kepegawaian Negara yang berfokus pada pelayanan masyarakat yang optimal, dalam hal ini adalah ASN yang merupakan stakeholder yang menjadi objek maupun subjek pelayanan kepegawaian. Pengembangan layanan kepegawaian yang berbasis on line sistem diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan selain juga mampu menjangkau jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang semakin bertambah setelah pelimpahan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pandemi Covid-19 membawa dampak pembatasan kegiatan secara menyeluruh, penyesuaian sistem kerja sesuai kondisi lingkungan strategis dan perkembangan kebijakan menjadi langkah strategis dalam mencegah penularan Covid-19 tanpa mengurangi pelayanan kepegawaian kepada seluruh ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan hukum

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86– 92) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
27. Permendagri 90 tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 28. Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Mendasarkan visi dan misi dimaksud, BKD Provinsi Jawa Tengah akan mendukung melalui implementasi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ke-2 yaitu “Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota.” melalui program Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menjabarkan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2020 dan Capaian Renstra BKD
 - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKD
 - 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKD Provinsi Jawa Tengah

- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

- BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021) dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada realisasi program/kegiatan terdapat beberapa target yang terpenuhi bahkan melampaui yaitu pada indikator Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I, Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas, Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI, Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar, Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui jin belajar, Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka, Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya, Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng, Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng, Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th), Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan, Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional, Jumlah PAK yang ditetapkan, Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi, Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota, Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD, Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan, Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD, Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota, Jumlah fasilitasi Izin Cuti, Jumlah pembuatan Karis/Karsu, Jumlah pembuatan Karpeg, Jumlah penerbitan SPTKG, Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS, Jumlah pelayanan administrasi pension, Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS, Test Mutasi PNS, Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS, Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian, Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS, Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian, Jumlah peserta apel siaga KORPRI, Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja, Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS, Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan

memasuki masa purna tugas, Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah, Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg, Jumlah dokumentasi profil kepegawaian, Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian, Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder), Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital, Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi), Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya, Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya, Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya, Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng, Penyempurnaan metode penilaian kompetensi.

Dalam situasi pandemi covid-19 yang menjadi bencana nasional non alam di Indonesia menyebabkan adanya pembatasan kegiatan dan refocusing anggaran dan kegiatan untuk penanganan covid-19. Hal ini berpengaruh terhadap ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target dan bahkan tidak dilaksanakan yaitu pada indikator Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas, Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas, Jumlah PNS yang masuk Talent Pool, Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta, Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS, Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS, Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik, Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender, Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg, Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan, Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK, Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya, Penyempurnaan metode penilaian kompetensi

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut di atas adalah untuk penyusunan Renstra ke depan akan dilakukan perbaikan penyusunan target indikator program/kegiatan dan pengawalan capaiannya yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai evaluasinya.

Tabel 2.1
Persandingan Program Priotitas Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Bidang Urusan	Program Priotitas Perangkat Daerah	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Kepegawaian	Program Penyelenggaran Kepegawaian Dan Perangkat Daerah	Program Kepegawaian Daerah
2.	Penunjang Umum	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2020

Kode	Urusan / Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Tingkat Realisasi s/d Target akhir Renstra 2018-2023 (%)	Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaran Kepegawaian Dan Perangkat Daerah										
		Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100	40	40	40	100	40	20	40	40

				Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	5	1	1	0	0	20	1	1	20
					Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	5	1	1	1	100	20	1	1	20
					Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	6.000	1,419	250	618	247.2	24	300	1,419	24
					Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	16.075	3,126	750	902	120.27	19	1250	3,126	19
					Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	65	23	13	13	100	35	12	23	35
					Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui jin belajar	250	208	50	50	100	83	50	208	83
					Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng	Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	29	20	1	1	100	69	9	20	69
					Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	2.250	972	450	0	0	43	450	972	43
					Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	1.000	380	200	150	75	38	200	380	38
				Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas	Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	836	803	190	425	223.68	96	174	803	96
					Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabse kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	4.356	3.165	1.638	1.638	100	73	940	3.165	73
				Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen	Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	5	2	1	1	100	40	1	2	40

				PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah										
				Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	5	2	1	0	0	40	1	2	40	
				Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	9.250	3.638	1.000	1.050	105	39	1850	3.638	39
				Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	1.000	430	100	100	100	43	250	430	43	
				Jumlah PAK yang ditetapkan	2.000	600	200	200	100	30	400	600	30	
				Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	21.500	5.500	2.000	2.250	112.5	26	4.000	5.500	26
					Persentase layanan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitas Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah	Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	5	2	1	1	100	40	1	2	40
				Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	750	300	150	150	100	40	150	300	40	
				Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana	Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	49	98	49	49	100	200	41	98	200
				Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	5	2	1	1	100	40	0	2	40	
				Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	50.000	21.957	10.000	10.997	109.97	44	10.000	21.957	44
				Layanan Administrasi Kegawain	Jumlah fasilitasi Izin Cuti	2.000	2.282	400	400	100	114	400	2.282	114

					Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	2.500	1.242	500	0	0	50	500	1.242	50
					Jumlah pembuatan Karis/Karsu	2.000	878	400	400	100	44	400	878	44
					Jumlah pembuatan Karpeg	1.500	602	300	300	100	40	300	602	40
					Jumlah penerbitan SPTKG	325	90	25	25	100	28	65	90	28
				Mutasi dan Pensiun PNS	Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	1.000	1.694	1.200	1.200	100	169	1000	1.694	169
					Jumlah pelayanan administrasi pensiun	10.000	4.195	2.000	2.010	100.5	38	2100	4.195	38
					Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	20	6	3	3	100	30	3	6	30
					Test Mutasi PNS	600	274	90	150	166.67	46	120	274	46
				Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN	Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	15.000	5.628	3.000	4.141	138.03	38	3000	5.628	38
					Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	625	263	125	94	75.2	42	125	263	42
					Persentase penanganan kasus kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	280	133	55	68	123.64	48	55	133	48
					Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	150	64	30	50	166.67	43	30	64	43
					Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	300	120	55	88	160	40	55	120	40
				Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	400	160	80	0	0	40	84	160	40
					Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	550	205	105	200	190.48	37	105	205	37
					Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	9	3	2	3	150	33	2	3	33

				Pembinaan Korps Profesi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	810	300	150	0	0	37	150	300	37
					Jumlah peserta apel siaga KORPRI	4.500	1.050	150	150	100	23	900	1.050	23
				Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS	Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	89	14	2	7	350	16	2	14	16
					Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	250	100	50	0	0	40	50	100	40
				Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	1.400	506	100	100	100	36	200	506	36
					Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	1.500	350	50	50	100	23	50	350	23
					Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	21.500	6.240	3.000	4.000	133.33	29	2.000	6.240	29
					Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi	100	100	40	40	100	40	20	100	40
				Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah	Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	25	9	4	4	100	36	5	9	36
					Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	300	120	60	60	100	40	60	120	40
					Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	40	14	6	6	100	35	6	14	35
					Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	5	2	1	0	0	40	1	2	40

				Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah	Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	5	2	1	0	0	40	1	2	40
					Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	5	2	1	0	0	40	1	2	40
				Dokumentasi Kepegawaian PNS	Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder)	9.000	3.600	1.800	1.800	100	40	1.800	3.600	40
					Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	1.762.500	705.000	352.500	352.500	100	40	352.500	705.000	40
					Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	5	2	1	1	100	40	1	2	40
					Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	100	21.5	21.5	21.5	100	21.5		21.5	21.5
				Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	2.286	684	412	0	0	30	180	684	30
					Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.	248	112	50	50	100	45	40	112	45
					Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.	1.200	703	220	346	157.27	59	300	703	59
				Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi	Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	10.000	2.224	150	426	284	22	700	2.224	22
					Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	10	3	1	1	100	30	2	3	30
					Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	5	2	1	1	100	40	1	2	40

				Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah										
					Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	40	100	100	40
				Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	85	34	17	17	100	40	17	34	40
				Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	40	12	24	40
					Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	24	12	12	100	40	12	24	40
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	24	12	12	100	40	12	24	40
				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	40	12	24	40
				Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah kendaraan roda 4	75	30	15	15	100	40	15	30	40
					Terwujudnya jaminan terhadap Barang Milik Daerah kendaraan roda 2	50	20	10	10	100	40	10	20	40
					Terwujudnya jaminan terhadap barang milik daerah gedung kantor	10	4	2	2	100	40	2	4	40
				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	40	12	24	40

				Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	24	12	12	100	40	12	24	40
				Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	40	12	24	40
				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	40	12	24	40
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	40	12	24	40
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	40	12	24	40
				Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	30	12	6	6	100	40	6	12	40
				Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	10	4	2	2	100	40	2	4	40
				Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	1000	400	200	200	100	40	200	400	40
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	150	60	30	30	100	40	30	60	40
				Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	5	2	1	1	100	40	1	2	40

				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	15	6	3	3	100	40	3	6	40
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	15	6	3	3	100	40	3	6	40

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah adalah meliputi tugas:

- a. Perencanaan dan pengembangan pegawai;
- b. Mutasi;
- c. Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, dan;
- d. Informasi Kepegawaian.

Dalam Bidang Perencanaan dan pengembangan pegawai, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap seleksi dan pengiriman peserta diklat, penyusunan data formasi, pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar, pengelolaan dan pengembangan pegawai, ujian kedinasan, penilaian SKP Jabatan Pimpinan Tinggi, seleksi dan pelantikan jabatan struktural, penyiapan bahan seleksi administrasi mutasi jabatan struktural, penyusunan konsep pola karir, mutasi kepegawaian jabatan fungsional tertentu, penyiapan bahan administrasi pengangkatan jabatan fungsional tertentu jenjang utama.

Dalam Bidang Mutasi, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pelaporan SKP ASN, usulan kenaikan pangkat, pemberian cuti, pengambilan sumpah janji ASN, pengusulan kartu pegawai elektronik, penerbitan kartu istri dan kartu suami, peninjauan masa kerja, penyiapan bahan pengadaan CPNSD dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, penyiapan bahan pengangkatan CPNSD dan PNS, pengkoordinasian dan penempatan siswa IPDN, penyiapan bahan penetapan pindah dan penetapan keputusan pemberhentian PNS, penetapan keputusan bebas tugas PNS yang akan pensiun sesuai batas usia pensiun, keputusan

Dalam Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pengelolaan kesejahteraan pegawai, fasilitasi layanan kesehatan fisik dan mental bagi pegawai, pengelolaan administrasi uji kesehatan PNS, pengelolaan jaminan kesehatan kerja, pengelolaan pemberian penghargaan, pelayanan administrasi BAPETARUM PNS, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian, layanan administrasi kepegawaian sesuai kewenangan daerah, pembinaan dan pengembangan profesi ASN, perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps ASN, pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, penyelenggaraan usaha peningkatan kesejahteraan anggota.

Dalam Bidang Informasi Kepegawaian, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi penggajian dan tunjangan kinerja PNS, pengelolaan presensi online PNSD, pengawasan proses pemutakhiran data kepegawaian daerah, rekonsiliasi data kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara.

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang penilaian kompetensi ASN. Dalam bidang uji kompetensi ditunjukkan dengan penyusunan rencana teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi dan penilaian kompetensi.

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13
1.	Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya			20	40	60	80	100	20	1.5	35	80	100	
2.	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar			20	60	80	80	100	20	40	60	80	100	
3.	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi Kinerjanya			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi (25 aplikasi dalam 5 tahun)			20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Tingkat kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tergambar dalam Tabel. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah yang meliputi tugas Perencanaan dan pengembangan pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, dan Informasi Kepegawaian, sehingga akan dapat terwujud melalui sinergi program dan kebijakan dalam bidang kepegawaian baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah. Disamping itu, koordinasi dan kerjasama dengan SKPD internal di pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa dibangun dan ditingkatkan dalam hal pelayanan kepegawaian. BKD Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian dalam upaya mendukung peningkatan kinerja pegawai dalam kerangka implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Untuk sasaran dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 telah selaras dengan misi BKN dalam upaya pengembangan dan optimalisasi pelayanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis IT. Oleh karena itu penguatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam lingkup kepegawaian menjadi penting untuk dilakukan mengingat fungsi fasilitasi provinsi dalam beberapa ruang lingkup pelayanan kepegawaian masih menghadapi kendala dalam implementasinya, antara lain terkait validasi dan update data pegawai serta belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan dengan BKN. Selain itu dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan pendampingan dalam pembuatan dokumen Renstra Kabupaten/Kota yang belum mengakomodasi indikator sistem merit, sehingga menjadi prioritas BKD Provinsi Jawa Tengah untuk membantu memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota untuk penerapan sistem merit.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sumber daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah selama dua tahun terakhir selama berjalannya Renstra 2018-2023, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Kebutuhan pemenuhan pegawai untuk mengisi formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi, khususnya untuk formasi jabatan yang terkait langsung dengan pelayanan publik, seiring bertambahnya jumlah pegawai yang pensiun.
- b. Tuntutan peningkatan layanan kepegawaian yang cepat, murah dan mudah seiring perkembangan teknologi mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.
- c. Masa pandemi Covid-19 berpengaruh pada perubahan sistem kerja ASN.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Terhadap Pencapaian Nasional/Internasional

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”.

Upaya mewujudkan visi dimaksud akan dilakukan melalui 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperluas kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Mendasarkan visi dan misi dimaksud, BKD Provinsi Jawa Tengah mendukung melalui implementasi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ke-2 yaitu “Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota.” melalui program Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan penyelenggara manajemen ASN dan pengelola kepegawaian daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9).

Adapun tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan kepegawaian ;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian ;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dijelaskan bahwa berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan

pemerintahannya.

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan dan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian, membentuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tantangan Pelayanan Kepegawaian :

- a. Belum adanya regulasi pola karier karena secara nasional belum ada acuan;
- b. Belum terlaksananya penilaian kinerja individu yang berkorelasi dengan capaian kinerja organisasi yang digunakan sebagai perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan pertimbangan reward dan punishment yang adil;
- c. Belum terwujudnya sistem remunerasi pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah;
- d. Masih terdapatnya mismatch dalam penempatan pegawai karena belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
- e. Kebutuhan untuk pengembangan kompetensi pegawai dan sarana dan prasarana IT, seiring tuntutan perkembangan global bidang SDM di era revolusi industri 4.0;
- f. Belum sinkronnya database kepegawaian antara SIMPEG dan SAPK;
- g. Kondisi Lingkungan Strategis dan perkembangan Kebijakan menuntut untuk penyesuaian sistem kerja ASN.

Peluang Pelayanan Kepegawaian :

- a. Belum tersusunnya konsep pola karir nasional menjadi peluang inisiasi untuk membuat konsep pola karir daerah menyesuaikan prioritas kebutuhan guna menjaga dan meningkatkan kinerja pegawai;
- b. Rintisan kinerja individu yang berkorelasi dengan capaian kinerja organisasi melalui penyusunan konsep e-kinerja berbasis SKP;
- c. Konsep kelas jabatan sedang disusun bersamaan dengan proses penetapan peta jabatan, sehingga dapat menjadi acuan pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- d. Proses penataan pegawai akan lebih terbantu dengan adanya ketentuan PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan, dan Memo Dinas Kepala BKN Nomor 01/MD/Ka/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditujukan kepada seluruh Kantor Regional,

bahwa semua pegawai yang dahulu melamar dengan formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) hanya akan naik pangkat jika telah diangkat dahulu dalam jabatan JFT sesuai formasi;

- e. Keberadaan Unit Penilaian Kompetensi ASN (UPENKOM) membantu dalam upaya melakukan pemetaan kompetensi pegawai;
- f. Adanya semangat sinergitas pembangunan kepegawaian di lingkungan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Adanya kegiatan yang mendukung terintegrasinya data SIMPEG dan SAPK;
- h. Penyesuaian sistem kerja sesuai kondisi lingkungan strategis dan perkembangan kebijakan.

2.3.5. Isu Strategis yang Perlu ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di Jawa Tengah dalam jangka menengah, maka dapat dihasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2020 antara lain :

- a. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring masih belum adanya beberapa peraturan turunan atas amanah UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan komitmen untuk mengimplementasikan sistem merit;
- b. Konsekuensi meningkatnya jumlah kasus kepegawaian pasca pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
- c. Kebutuhan sarpras (*hardware/software*) dan infrastruktur IT untuk peningkatan otomatisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan *paperless* sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi;
- d. Penyesuaian sistem kerja ASN sesuai kondisi lingkungan strategis dan perkembangan kebijakan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan melalui identifikasi program atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Hasil reviu dapat dilihat pada tabel 2.3 dan dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase PNS Yang Terpetakan Kompetensinya (Sesuai Target Yang Ditetapkan 10.000 orang dalam 5 tahun)	80%	1,144,840,000	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase PNS Yang Terpetakan Kompetensinya (Sesuai Target Yang Ditetapkan 10.000 orang dalam 5 tahun)	80%	1,144,840,000	
	Pengembangan kompetensi ASN		Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah	100%	594,840,000	Pengembangan kompetensi ASN	Semarang	Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah	100%	594,840,000	
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	5150 Orang	385,000,000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	5150 Orang	385,000,000	
			Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	2 Dokumen	45,000,000			Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	2 Dokumen	45,000,000	
			Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	1 Dokumen	164,840,000			Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	1 Dokumen	164,840,000	
	Pengembangan kompetensi ASN		Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi	100%	550,000,000	Pengembangan kompetensi ASN		Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi	100%	550,000,000	
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	250 Orang	180,000,000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	250 Orang	180,000,000	

		Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.	50 Orang	200,000,000			Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.	50 Orang	200,000,000	
		Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.	260 Orang	170,000,000			Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.	260 Orang	170,000,000	
Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	80 %	3,795,000,000	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	80 %	3,795,000,000	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase usulan formasi ASN	100%	331,390,000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase usulan formasi ASN	100%	331,390,000	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	1 Dokumen	284,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	1 Dokumen	284,000,000	
		Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	1 Dokumen	47,390,000			Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	1 Dokumen	47,390,000	
Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi	100%	3,463,610,000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi	100%	3,463,610,000	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	1 Orang	49,764,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	1 Orang	49,764,000	
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	1 Orang	113,846,000			Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	1 Orang	113,846,000	

		Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	300 Orang	253,474,000			Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	300 Orang	253,474,000	
		Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	80 Orang	148,184,000			Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	80 Orang	148,184,000	
		Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	50 Orang	120,214,000			Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	50 Orang	120,214,000	
		Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	13 Orang	2,778,128,000			Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	13 Orang	2,778,128,000	
Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100%	1,967,440,000	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100%	1,967,440,000	
Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan	100%	935,450,000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan	100%	935,450,000	
Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatan dan Persyaratan Objektif lainnya	6 Orang	918,590,000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatan dan Persyaratan Objektif lainnya	6 Orang	918,590,000	
		Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	170 Orang	16,860,000			Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	170 Orang	16,860,000	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN yang dinilai PKSP	100%	531,990,000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN yang dinilai PKSP	100%	531,990,000	

		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	768 Orang	383,750,000		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	768 Orang	383,750,000	
				Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	270 Orang	6,200,000				Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	270 Orang	6,200,000	
				Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	678 Orang	142,040,000				Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	678 Orang	142,040,000	
		Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	100%	500,000,000		Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	100%	500,000,000	
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	2000 Orang	58,762,000		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	2000 Orang	58,762,000	
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	1862 sertifikat	404,703,000		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	1862 sertifikat	404,703,000	
				Jumlah PAK yang ditetapkan	500 lembar	11,435,000				Jumlah PAK yang ditetapkan	500 lembar	11,435,000	
				Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	250 Orang	25,100,000				Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	250 Orang	25,100,000	
		Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%	7,889,000,000		Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase layanan administrasi kepegawaian	100%	7,889,000,000	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%	365,000,000		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%	365,000,000	

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah pelayanan administrasi pensiun	2395 Sertifikat	215,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah pelayanan administrasi pensiun	2395 Sertifikat	215,000,000	
		Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	6 Kegiatan	150,000,000			Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	6 Kegiatan	150,000,000	
Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng	75%	105,000,000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng	75%	105,000,000	
Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	49 OPD	12,000,000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	49 OPD	12,000,000	
		Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	200 Orang	60,000,000			Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	200 Orang	60,000,000	
		Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	0 Dokumen	-			Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	0 Dokumen	-	
		Test Mutasi PNS	100 Orang	33,000,000			Test Mutasi PNS	100 Orang	33,000,000	
Mutasi dan Promosi ASN		Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	494,000,000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	494,000,000	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah fasilitasi Izin Cuti	400 Orang	13,180,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah fasilitasi Izin Cuti	400 Orang	13,180,000	
		Jumlah pembuatan Karis/Karsu	400 Orang	18,540,000			Jumlah pembuatan Karis/Karsu	400 Orang	18,540,000	
		Jumlah pembuatan Karpeg	300 Orang	15,910,000			Jumlah pembuatan Karpeg	300 Orang	15,910,000	
		Jumlah penerbitan SPTKG	20 Orang	1,700,000			Jumlah penerbitan SPTKG	20 Orang	1,700,000	

		Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	10000 Sertifikat	396,730,000			Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	10000 Sertifikat	396,730,000	
		Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji	750 Orang	47,940,000			Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji	750 Orang	47,940,000	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase CASN yang lolos seleksi pengadaan ASN	90%	6,925,000,000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase CASN yang lolos seleksi pengadaan ASN	90%	6,925,000,000	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	3000 Orang	56,880,000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	3000 Orang	56,880,000	
		Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	135 orang	18,120,000			Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	135 orang	18,120,000	
		Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	150 orang	146,020,000			Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	150 orang	146,020,000	
		Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	1 Kegiatan	6,703,980,000			Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	1 Kegiatan	6,703,980,000	
Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	1,340,000,000	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	1,340,000,000	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	100%	258,000,000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	100%	258,000,000	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	150 Orang	165,000,000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	150 Orang	165,000,000	
		Jumlah peserta apel siaga KORPRI	900 Orang	93,000,000			Jumlah peserta apel siaga KORPRI	900 Orang	93,000,000	

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya	100%	600,000,000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya	100%	600,000,000	
Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	2 Dokumen	3,400,000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	2 Dokumen	3,400,000	
		Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	115 Orang	118,000,000			Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	115 Orang	118,000,000	
		Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	80 orang	141,600,000			Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	80 orang	141,600,000	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	30 Kasus	33.750,000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	30 Kasus	33.750,000	
		Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	65 Berkas	2.700,000			Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	65 Berkas	2.700,000	
		Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	60 Kasus	300.550,000			Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	60 Kasus	300.550,000	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	100 %	482.000,000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	100 %	482.000,000	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	50 Orang	74.398,000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	50 Orang	74.398,000	
		Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	2 Dokumen	72.052,000			Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	2 Dokumen	72.052,000	
		Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	50 Orang	200.575,000			Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	50 Orang	200.575,000	
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	100 Orang	62.110,000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	100 Orang	62.110,000	
		Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	2000 Berkas	72.865,000			Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	2000 Berkas	72.865,000	

Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang dikembangkan	100%	1,138,280,000	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang dikembangkan	100%	1,138,280,000	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan	100%	798.280.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan	100%	798.280.000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	1 Buah	46.000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	1 Buah	46.000,000	
		Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	6 Aplikasi	284.000,000			Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	6 Aplikasi	284.000,000	
		Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	1 Kegiatan	232.380,000			Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	1 Kegiatan	232.380,000	
		Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	60 Buku	6,600,000			Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	60 Buku	6,600,000	
		Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	1 Kegiatan	96.280,000			Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	1 Kegiatan	96.280,000	
		Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	6 Kegiatan	133.020,000			Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	6 Kegiatan	133.020,000	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	340,000,000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	340,000,000	
Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder)	352,500 Dokumen	69.600,000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder)	352,500 Dokumen	69.600,000	

			Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	1,800 Buah	162.660,000			Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	1,800 Buah	162.660,000	
			Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	1 Kegiatan	107.740,000			Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	1 Kegiatan	107.740,000	
II.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	350,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	350,000,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	6 Dokumen	350,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	6 Dokumen	350,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	170,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	170,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	180,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	180,000,000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semarang	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	350,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Semarang	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	350,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 Dokumen	71.869.372.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 Dokumen	71.869.372.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	70.337.722.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	70.337.722.000	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	1.471.650.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	1.471.650.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan keuangan PD (jenis)	17 Dokumen	60.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan keuangan PD (jenis)	17 Dokumen	60.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	154,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	154,000,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	154,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	154,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	500,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	500,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	200 Unit	200,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	200 Unit	200,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	30 Orang	300,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	30 Orang	300,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,425,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,425,500,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	30,000,000	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	12 Bulan	1,300,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	12 Bulan	1,300,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	12 Bulan	40,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	12 Bulan	40,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	247,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	247,500,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	400,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	400,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bulan	18,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bulan	18,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	340.000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	340.000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	800.000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	800.000,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	1 Laporan	250,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	1 Laporan	250,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	280.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	280.000.000	

Daerah					Daerah					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	- Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	- Unit	-	
Pengadaan Mebel		Jumlah unit pengadaan meubelair	3 Unit	30,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah unit pengadaan meubelair	3 Unit	30,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	6 Unit	250,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	6 Unit	250,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.775.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.775.900.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12 Bulan	60,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12 Bulan	60,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12 Bulan	750,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12 Bulan	750,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor *	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor *	12 Bulan	100,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	865.900,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	865.900,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1,613.390,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1,613.390,000	

Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	350.000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	350.000,000	
Pemeliharaan Mebel		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	20,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	20,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	2 Unit	886.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	2 Unit	886.100.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bulan	357.290,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bulan	357.290,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menampung usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai saran masukan dalam peningkatan pelayanan organisasi. Proses usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan disampaikan melalui kanal-kanal informasi BKD Provinsi Jawa Tengah antara lain website: <https://bkd.jatengprov.go.id>., whatsapp: 08112777346, twitter: @bkdjatengprov, email: bkd@jatengprov.go.id dan telpon (024) 8519421, 841581, 8318846. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh bidang terkait yang menangani substansi usulan/ laporan tersebut.

Usulan yang ditindaklanjuti adalah usulan yang memang menjadi ranah tupoksi BKD Provinsi Jawa Tengah yang secara program/kegiatan merupakan implementasi penyelesaian isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi BKD sesuai tujuan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan penting
1	2	3	4	5	6
I. Program Kepegawaian Daerah					
1.	Program Kepegawaian Daerah	Unit Penilaian Kompetensi ASN	Persentase PNS Yang Terpetakan Kompetensinya (Sesuai Target Yang Ditetapkan 10.000 orang dalam 5 tahun)		
	Pengembangan kompetensi ASN	Seksi Penilaian Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi	100%	
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	5150 Orang	
			Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	2 Dokumen	
			Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	1 Dokumen	
	Pengembangan kompetensi ASN	Seksi Penilaian Kompetensi ASN	Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah	100%	
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	250 Orang	
			Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.	50 Orang	
2.	Program Kepegawaian Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub Bidang Formasi dan Pengembangan	Persentase usulan formasi ASN	100%	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	1 Dokumen	
			Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	1 Dokumen	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Sub Bidang Formasi dan Pengembangan	Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi	100%	

	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	1 Orang	
			Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	1 Orang	
			Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	300 Orang	
			Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	80 Orang	
			Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	50 Orang	
			Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	13 Orang	
3.	Program Kepegawaian Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya		
	Mutasi dan Promosi ASN	Sub Bidang Jabatan Struktural	Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan	100%	
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatan dan Persyaratan Objektif lainnya	6 Orang	
			Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	170 Orang	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sub Bidang Jabatan Struktural	Persentase ASN yang dinilai PKSP	100%	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	768 Orang	
			Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	270 Orang	
			Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	678 Orang	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional	Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	100%	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	2000 Orang	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan		Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai	500	

	Fungsional		peraturan perundang-undangan	Orang	
			Jumlah PAK yang ditetapkan	250	
			Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	1862	
				Orang	
4.	Program Kepegawaian Daerah	Bidang Mutasi	Persentase layanan administrasi kepegawaian		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian	Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah pelayanan administrasi pensiun	2395	
				Sertifikat	
			Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	6	
				Kegiatan	
	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng	75	
				Orang	
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	49	
				OPD	
			Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	200	
				Orang	
			Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	0	
				Dokumen	
			Test Mutasi PNS	100	
				Orang	
	Mutasi dan Promosi ASN	Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Layananan Adm. Kepegawaian	Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu	100%	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah fasilitasi Izin Cuti	400	
				Orang	
			Jumlah pembuatan Karis/Karsu	400	
				Orang	
			Jumlah pembuatan Karpeg	300	
				Orang	
			Jumlah penerbitan SPTKG	20	
				Orang	
			Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	10000	
				Sertifikat	
			Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji	750	

				Orang	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub Bidang Pengangkatan	Persentase CASN yang lolos seleksi pengadaan ASN	90%	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	3000 Orang	
			Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	135 orang	
			Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	150 orang	
			Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	1 Kegiatan	
5.	Program Kepegawaian Daerah	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase penanganan kasus kepegawaian		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub Bidang Pengelola Korps Profesi ASN	Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	100%	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	150 Orang	
			Jumlah peserta apel siaga KORPRI	900 Orang	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sub Bidang Pembinaan	Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya	100%	
	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	2 Kegiatan	
			Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	115 Orang	
			Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	80 orang	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	30 Kasus	
			Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	65 Berkas	
			Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	60 Kasus	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai	Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	100%	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	50 Orang	

			Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	2 Dokumen	
			Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	50 Orang	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	100 Orang	
			Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	2000 Berkas	
6.	Program Kepegawaian Daerah	Bidang Informasi Kepegawaian	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang dikembangkan		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub Bidang Penglola Data Kepegawaian	Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	1 Buah	
			Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	6 Aplikasi	
			Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	1 Kegiatan	
			Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	60 Buku	
			Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	1 Kegiatan	
			Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	6 Kegiatan	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian	Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan	100%	
	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder)	352,500 Dokumen	
			Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	1,800 Buah	
			Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	1 Buku	
II.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja		

	Provinsi		OPD		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Program	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	6 Dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretariat	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Bagian Keuangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 Dokumen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan keuangan PD (jenis)	17 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	200 Unit	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	30 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	12 Bulan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	12 Bulan	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	12 Bulan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bulan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	1 Laporan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	3 Unit	
	Pengadaan Mebel		Jumlah unit pengadaan meubelair	3 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainny	6 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor *	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	

	atau Lapangan				
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	2 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bulan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2022 merupakan tahun ke-4 perencanaan pembangunan jangka menengah Jawa Tengah tahun 2018-2023. Sebagaimana bentuk penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Proses dan tahapan penyusunan Renja BKD tahun 2022 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja BKD Tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembagunan tahun 2020 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari *Coronavirus Disease 2019* (COVID -19) yang oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 akan fokus pada upaya pertolongan dan pemulihan dampak pandemi Covid -19 terutama pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Renja BKD Tahun 2022 juga diselaraskan dengan RKP Tahun 2022, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menjabarkan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

3.2.2 Sasaran Renja PD sesuai dengan Tugas, pokok dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang terpetakan kompetensinya (Persentase yang terpetakan 80%)
- b. PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (Persentase mengikuti TB/IB 20% (63 orang))
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Yang Terevaluasi Kinerjanya (Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi 100%)
- d. Layanan Administrasi Kepegawaian (Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100%).
- e. Penanganan Kasus Kepegawaian (Persentase penanganan pelanggaran disiplin PNS 100%).
- f. Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi (Persentase Aplikasi kepegawaian dikembangkan 20% (5 aplikasi))

Tabel. 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN		Nilai Sistem Merit	Nilai	300 (dalam index 0,71)
		1. Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan	%	100 %
		2. Pelayanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100 %
2.	Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	88
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	88
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	75

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel. 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				(17)	(18)
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah													80,053,162,000		88,040,749,000		Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Kepuasan Masyarakat										Angka	88		89		Badan Kepegawaian Daerah	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah											350,000,000		385,000,000		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah								Angka	75	350,000,000	76	385,000,000		Badan Kepegawaian Daerah
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								350,000,000		385,000,000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD					%	100	350,000,000	100	385,000,000		SEKRETARIAT
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350,000,000		385,000,000		
								Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun			Dokumen	6	350,000,000	6	385,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM
				X.XX.01.1.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				170,000,000		187,000,000		
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		Dokumen	3	170,000,000	3	187,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM
				X.XX.01.1.01.07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				180,000,000		198,000,000		
									Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	3	180,000,000	3	198,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM

		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah										79,703,162,000		87,655,749,000		
			Nilai Kepuasan Masyarakat							Angka	88	79,703,162,000	89	87,655,749,000	Badan Kepegawaian Daerah	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							79,703,162,000		87,655,749,000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah				%	100	79,618,162,000	100	87,562,249,000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71,869,372,000		79,056,309,000		
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen	17	71,869,372,000	17	79,056,309,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				70,337,722,000		77,371,494,000		
									Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	70,337,722,000	12	77,371,494,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1,471,650,000		1,618,815,000		
									Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1,471,650,000	12	1,618,815,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60,000,000		66,000,000		
									Jumlah laporan keuangan PD (jenis)	Laporan	17	60,000,000	17	66,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					154,000,000		169,400,000		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen	1	154,000,000	1	169,400,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.03.02				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				154,000,000		169,400,000		

									Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	154,000,000	12	169,400,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					500,000,000		550,000,000		
							Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Dokumen	1	500,000,000	1	550,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				200,000,000		220,000,000		
								Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit		200	200,000,000	200	220,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				300,000,000		330,000,000		
								Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang		30	300,000,000	30	330,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					3,425,500,000		3,768,050,000		
							Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Dokumen	1	3,425,500,000	1	3,768,050,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30,000,000		33,000,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan		12	30,000,000	12	33,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1,300,000,000		1,430,000,000		
								Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit		12	1,300,000,000	12	1,430,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40,000,000		44,000,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan		12	40,000,000	12	44,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				247,500,000		272,250,000		

									Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	247,500,000	12	272,250,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			400,000,000		440,000,000		
									Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	400,000,000	12	440,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			18,000,000		19,800,000		
									Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	18,000,000	12	19,800,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitas Kunjungan Tamu			340,000,000		374,000,000		
									Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	340,000,000	12	374,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			800,000,000		880,000,000		
									Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	800,000,000	12	880,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			250,000,000		275,000,000		
									Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	250,000,000	1	275,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				280,000,000		308,000,000		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen	1	280,000,000	1	308,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		
									Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel			30,000,000		33,000,000		

									Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	3	30,000,000	3	33,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250,000,000		275,000,000		
									Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	6	250,000,000	6	275,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,775,900,000		1,953,490,000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1	1,775,900,000	1	1,953,490,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat			60,000,000		66,000,000		
									Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	60,000,000	12	66,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			750,000,000		825,000,000		
									Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	750,000,000	12	825,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100,000,000		110,000,000		
									Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	100,000,000	12	110,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			865,900,000		952,490,000		
									Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	865,900,000	12	952,490,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,613,390,000		1,757,000,000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen	1	1,613,390,000	1	1,757,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

				X.XX.01.1.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350,000,000		385,000,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12		350,000,000	12	385,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.05				Pemeliharaan Mebel				20,000,000		22,000,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		20,000,000	12	22,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				886,100,000		960,000,000		
								Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2		886,100,000	2	960,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				357,290,000		390,000,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		357,290,000	12	390,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		%	100		85,000,000	100	93,500,000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					85,000,000		93,500,000		
							Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah		Bulan	12		85,000,000	12	93,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.08				Fasilitas Kunjungan Tamu				35,000,000		38,500,000		
								Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12		35,000,000	12	38,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50,000,000		55,000,000		

									Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	50,000,000	12	55,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit dalam Manajemen ASN												17,274,560,000		19,222,016,000	Badan Kepegawaian Daerah	
	Nilai Sistem Merit									Nilai	280		284		Badan Kepegawaian Daerah	
		Distribusi penempatan PNS dalam jabatan										6,907,280,000		7,598,008,000		
			Persentase distribusi penempatan PNS dalam jabatan							%	100	6,907,280,000	100	7,598,008,000	Badan Kepegawaian Daerah	
				5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							6,907,280,000		7,598,008,000		
						Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya				%	100	1,967,440,000	100	2,164,181,000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
				5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi ASN						935,450,000		1,028,995,000		
							Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan			%	100	935,450,000	100	1,028,995,000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
				5.03.02.1.02.03				Pengelolaan Promosi ASN				935,450,000		1,028,995,000		
									Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	Orang	6	918,590,000	1	1,010,449,000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
									Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatan dan Persyaratan Objektif lainnya	Orang	170	16,860,000	160	18,546,000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
				5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN						500,000,000		550,002,000		
							Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional			%	100	500,000,000	100	550,002,000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
				5.03.02.1.03.13				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				58,762,000		64,639,000		

									Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan dievaluasi	Orang	2000	58,762,000	2000	64,639,000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
				5.03.02.1.03.14					Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			441,238,000		485,363,000		
									Jumlah PAK yang ditetapkan	Lembar	500	11,435,000	500	12,579,000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
									Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	Orang	250	25,100,000	250	27,610,000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
									Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	Sertifikat	1862	404,703,000	1850	445,174,000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
				5.03.02.1.04				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				531,990,000		585,184,000		
								Persentase ASN yang dinilai PKSP		%	100	531,990,000	100	585,184,000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
				5.03.02.1.04.02					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			531,990,000		585,184,000		
									Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	Orang	768	383,750,000	940	422,120,000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
									Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	Orang	270	6,200,000	200	6,820,000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
									Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	Orang	678	142,040,000	600	156,244,000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
								Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar		%	80	3,795,000,000	100	4,174,503,000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
				5.03.02.1.01				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				331,390,000		364,529,000		
								Persentase usulan formasi ASN		%	100	331,390,000	100	364,529,000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	

				5.03.02.1.01.02				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				331,390,000		364,529,000		
								Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	Dokumen	1	284,000,000	1	312,400,000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN		
								Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	Dokumen	1	47,390,000	1	52,129,000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN		
				5.03.02.1.03			Pengembangan Kompetensi ASN				3,463,610,000		3,809,974,000			
							Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi		%	100	3,463,610,000	100	3,809,974,000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN		
				5.03.02.1.03.04			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				3,463,610,000		3,809,974,000			
							Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	Orang	1	49,764,000	1	54,741,000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN			
							Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	Orang	1	113,846,000	1	125,231,000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN			
							Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	Orang	300	253,474,000	300	278,822,000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN			
							Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	Orang	800	148,184,000	800	163,003,000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN			
							Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	Orang	50	120,214,000	50	132,236,000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN			
							Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	Orang	13	2,778,128,000	13	3,055,941,000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN			
						Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya			%	80	1,144,840,000	100	1,259,324,000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A		
				5.03.02.1.03			Pengembangan Kompetensi ASN				1,144,840,000		1,259,324,000			
							Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah		%	100	594,840,000	100	654,324,000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI		

				5.03.02.1.03.02					Pengelolaan Assessment Center				594,840,000		654,324,000		
									Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	Orang	5150	385,000,000	2000	423,500,000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI		
									Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	Dokumen	2	45,000,000	2	49,500,000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI		
									Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	Dokumen	1	164,840,000	1	181,324,000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI		
								Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi		%	100	550,000,000	100	605,000,000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI		
				5.03.02.1.03.02					Pengelolaan Assessment Center				550,000,000		605,000,000		
									Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	Orang	225	180,000,000	250	198,000,000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI		
									Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.	Orang	40	200,000,000	50	220,000,000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI		
									Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.	Orang	260	170,000,000	280	187,000,000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI		
			Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi										10,367,280,000		11,624,008,000		
			Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi							%	100	10,367,280,000	100	11,624,008,000	Badan Kepegawaian Daerah		
				5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								10,367,280,000		11,624,008,000		
									Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian		%	100	7,889,000,000	100	8,897,900,000	Bidang Mutasi	
				5.03.02.1.01					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				7,290,000,000		8,239,000,000		
									Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN		%	90	6,925,000,000	90	7,837,500,000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	

				5.03.02.1.01.03					Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK			6,925,000,000		7,837,500,000		
									Jumlah fasilitas seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Orang	3000	56,880,000	3000	62,568,000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
									Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Orang	135	18,120,000	135	19,932,000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
									Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	Orang	150	146,020,000	150	160,622,000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
									Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitas pengadaan CPNSD Kab/Kota	Kegiatan	1	6,703,980,000	1	7,594,378,000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
							Persentase layanan pensiun tepat waktu			%	100	365,000,000	100	401,500,000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
				5.03.02.1.01.06					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			365,000,000		401,500,000		
									Jumlah pelayanan administrasi pensiun	Sertifikat	2395	215,000,000	2300	236,500,000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
									Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	Kegiatan	6	150,000,000	5	165,000,000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
				5.03.02.1.02			Mutasi dan Promosi ASN					599,000,000		658,900,000		
							Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu			%	100	494,000,000	100	543,400,000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
				5.03.02.1.02.02					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			494,000,000		543,400,000		
									Jumlah fasilitas Izin Cuti	Orang	400	13,180,000	400	14,498,000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
									Jumlah pembuatan Karis/ Karsu	Orang	400	18,540,000	400	20,394,000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
									Jumlah pembuatan Karpeg	Orang	300	15,910,000	300	17,501,000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	

										Jumlah penerbitan SPTKG	Orang	20	1,700,000	20	1,870,000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
										Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	Sertifikat	10000	396,730,000	10000	436,403,000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
										Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji	Orang	750	47,940,000	750	52,734,000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
									Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng		%	75	105,000,000	75	115,500,000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
				5.03.02.1.02.01					Pengelolaan Mutasi ASN				105,000,000		115,500,000		
										Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	OPD	49	12,000,000	49	13,200,000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
										Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	Orang	200	60,000,000	200	66,000,000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
										Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	Dokumen			0		SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
										Test Mutasi PNS	Orang	100	33,000,000	100	36,300,000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
									Presentase penanganan kasus kepegawaian		%	100	1,340,000,000	100	1,474,000,000	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	
				5.03.02.1.01					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				258,000,000		283,800,000		
									Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik		%	100	258,000,000	100	283,800,000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	
				5.03.02.1.01.08					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				258,000,000		283,800,000		
										Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	Orang	150	165,000,000	150	181,500,000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	

									Jumlah peserta apel siaga KORPRI	Orang	900	93,000,000	900	102,300,000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	
				5.03.02.1.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1,082,000,000		1,190,200,000		
							Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya			%	100	600,000,000	100	660,000,000	SUB BIDANG PEMBINAAN	
				5.03.02.1.04.07				Pembinaan Disiplin ASN				263,000,000		289,300,000		
								Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	Dokumen		2	3,400,000	1	3,740,000	SUB BIDANG PEMBINAAN	
								Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	Orang		80	141,600,000	80	155,760,000	SUB BIDANG PEMBINAAN	
								Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang		115	118,000,000	120	129,800,000	SUB BIDANG PEMBINAAN	
				5.03.02.1.04.08				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				337,000,000		370,700,000		
								Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	Kasus		30	33,750,000	30	37,125,000	SUB BIDANG PEMBINAAN	
								Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	Berkas		65	2,700,000	70	2,970,000	SUB BIDANG PEMBINAAN	
								Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	Kasus		60	300,550,000	60	330,605,000	SUB BIDANG PEMBINAAN	
							Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS			%	100	482,000,000	100	530,200,000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
				5.03.02.1.04.04				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				347,025,000		381,727,000		
								Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	Orang		50	74,398,000	50	81,838,000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
								Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	Dokumen		2	72,052,000	2	79,258,000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
								Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	Orang		50	200,575,000	50	220,631,000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	

				5.03.02.1.04.05				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				134,975,000		148,473,000		
									Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	Orang	100	62,110,000	100	68,321,000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
									Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	Berkas	2000	72,865,000	2000	80,152,000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
						Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan				%	80	1,138,280,000	100	1,252,108,000	Bidang Informasi Kepegawaian	
				5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						1,138,280,000		1,252,108,000		
							Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan			%	100	340,000,000	100	374,000,000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	
				5.03.02.1.01.11				Pengelolaan Data Kepegawaian				340,000,000		374,000,000		
									Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	Dokumen	352500	69,600,000	352500	76,560,000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	
									Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomafolder)	Buah	1800	162,660,000	1800	178,926,000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	
									Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	Kegiatan	1	107,740,000	1	118,514,000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	
							Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian			%	100	798,280,000	100	878,108,000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
				5.03.02.1.01.10				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				798,280,000		878,108,000		
									Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	Buah	1	46,000,000	1	50,600,000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
									Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	Kali	6	284,000,000	5	312,400,000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	

										Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	Kegiatan	1	232,380,000	1	255,618,000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
										Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	Buku	60	6,600,000	60	7,260,000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
										Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	Kegiatan	1	96,280,000	1	105,908,000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
										Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	Kegiatan	6	133,020,000	6	146,322,000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 merupakan penjabaran RKPD tahun 2022 pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Penyusunan Rencana Kerja lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan RKA-BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2022, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam bidang kepegawaian khususnya dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi.” Serta melaksanakan program unggulan Gubernur Jawa Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi berbasis kompetensi dan memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan, dan terintegrasi.

Pemetaan Kompetensi PNS menjadi perhatian BKD Provinsi Jawa Tengah dengan adanya rasionalisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 maka menjadi perhatian untuk meningkatkan capaian pemetaan kompetensi PNS di tahun 2022 dan pengembangan layanan kepegawaian berbasis online sistem.